



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 100.3.3.4/ 68 /2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39).

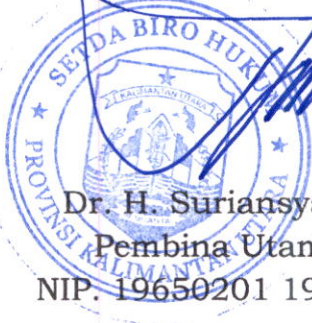
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 202.
- KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang selengkapanya tercantum sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA :** Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara di bidang ke-APBD-an karena sifatnya rutin dengan mekanisme tersendiri, maka tetap juga menjadi agenda Tahunan selain yang ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Kepada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pengusul atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, agar segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan mengoordinasikan bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/mechanismenya sesuai ketentuan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui DPA-OPD/Unit Kerja masing-masing pada Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Utara di Samarinda.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 100.3.3.4/ 68 /2024  
 TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 KEPALA DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

No (1)	TENTANG (2)	STATUS (3)		PELAKSANAAN (4)	PD/Unit Kerja (5)	TARGET PENYAMP AIAN (6)	KET (7)
		BARU	UBAH				
1.	Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	√			Dinas Kesehatan	2025	2024
2.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√		Biro Organisasi	2025	2024
3.	Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pelaksanaan dan Penataan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara	√			Dinas Lingkungan Hidup	2025	2024
4.	Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	√			Biro Organisasi	2025	2024
5.	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Olahraga dan Pemuda Terintegrasi Kalimantan Utara	√			Dinas Pemuda dan Olahraga	2025	2024
6.	Percepatan Pelaksanaan Eliminasi Malaria	√			Dinas Kesehatan	2025	2024
7.	Standar Kompetensi Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	√			Biro Organisasi	2025	2024
8.	Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Isu di Media Massa	√			Biro Administrasi Pimpinan	2025	2024
9.	Tata Kelola Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi	√			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman	2025	2024
10.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	√			Dinas Kelautan dan Perikanan	2025	2024

11.	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD	√			Biro Perekonomian	2025	2024
12.	Hak Keuangan Badan Amil Zakat	√			Biro Kesejahteraan Rakyat	2025	2024
13.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.H.Jusuf Sk Provinsi Kalimantan Utara	√			Dinas Kesehatan/Rsud	2025	2024
14.	Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Jusuf Sk dengan Pihak Lain	√			Biro Perekonomian	2025	2024
15.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025	
16.	Integrasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025	
17.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025		√		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025	
18.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025	
19.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025	
20.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025	
21.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah	√			Biro Organisasi	2025	
22.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	√			Biro Organisasi	2025	
23.	Pembentukan UPTD Dinas Pu dan Perkim	√			Biro Organisasi	2025	
24.	Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara	√			Biro Organisasi	2025	

25.	Pembentukan KPH pada Dinas Kehutanan	√			Biro Organisasi	2025		
26.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		√		Biro Organisasi	2025		
27.	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2030	√			Biro Organisasi	2025		
28.	Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Kalimantan Utara	√			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025		
29.	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara Tahun 2024-2026	√			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2025		
30.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√		Badan Pendapatan Daerah	2025		
31.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025	√			Badan Pendapatan Daerah	2025		
32.	Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Utara	√			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025		
33.	Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	√			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025		
34.	Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	√			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025		
35.	Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan serta Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru Pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	√			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025		
36.	Komite Sekolah	√			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025		
37.	Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja Dalam Pendidikan	√			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025		

38.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara	√			Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025		
39.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumput Laut		√		Dinas Kelautan dan Perikanan	2025		
40.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025		
41.	Sistem Informasi Desa	√			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025		
42.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Hidrometeorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara		√		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman	2025		
43.	Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kayan Tahun 2024-2043	√			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman	2025		
44.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	√			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025		
45.	Manajemen Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	√			Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025		
46.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025		
47.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025		
48.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025		
49.	Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025		
50.	Peraturan Pelaksanaan Musrenbang Inklusi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029	√			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2025		

51.	Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra di Provinsi Kalimantan Utara	√			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2025	
52.	Analisis Standar Belanja	√			Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
53.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga	√			Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
54.	Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara	√			Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
55.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi ASN Tahun 2025 di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara	√			Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
56.	Program Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Daerah Provinsi Kalimantan Utara	√			Dinas Lingkungan Hidup	2025	
57.	Biaya Operasional Penunjang Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025	√			Biro Umum	2025	

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. SURFANSYAH, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 196502011991031009